



*Edisi 6*

# BUNGA RAMPAI

FISIP-UT

2009



Jln. Cabe Raya, Pondok Cabe,  
Pamulang, Kota Tangerang Selatan 15418  
Tel. +62.021.7490941  
Fax. +62.021.7490147  
[www.ut.ac.id](http://www.ut.ac.id)



*Edisi 6*

# **BUNGA RAMPAI**

FISIP-UT

2009

---

Hak Cipta © pada Penulis dan Dilindungi Undang-undang  
Hak Penerbitan pada Penerbit Universitas Terbuka  
Departemen Pendidikan Nasional  
Kotak Pos 6666 – Jakarta 10001  
Indonesia

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini  
dalam bentuk apa pun, tanpa izin dari penerbit

Edisi Ke-6  
Cetakan Pertama, Agustus 2009

Penulis : Tim Penulis FISIP-UT

Penelaah Materi : Tim Penulis FISIP-UT

Desain Cover & Ilustrator : Sunarti  
Layouter : Eddy Purnomo

350  
BUN

BUNGA Rampai/Tim Penulis FISIP-UT-2009  
Edisi Keenam, Cetakan pertama, Jakarta,  
Universitas Terbuka, 2009  
310 hal; ill; 21 cm  
ISBN: 978-979-011-465-4

1. bunga rampai  
Tim Penulis FISIP-UT-2009



## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan ridho-Nya jualah buku Bunga Rampai FISIP-UT edisi ke-6 dapat terbit. Buku Bunga Rampai ini seharusnya terbit satu tahun dua kali, namun karena adanya pergantian kepengurusan Bunga Rampai maka edisi ke-6 ini mengalami keterlambatan dalam penerbitannya.

Kumpulan tulisan ini adalah hasil kajian staf edukatif yang telah diseminarkan dalam seminar akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UT. Berbagai tema yang menjadi bidang kajian Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dibahas dalam seminar tersebut, baik kajian yang bersifat teoritik maupun yang bersifat praktik. Berbagai tema dari artikel yang diterbitkan pada edisi ini, diharapkan dapat bermanfaat tidak hanya bagi dosen, mahasiswa, dan alumni FISIP-UT saja, tetapi juga bagi masyarakat luas yang tertarik dengan bidang kajian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Kehadiran buku Bunga Rampai FISIP-UT ini merupakan hasil kerja tim yang cukup solid dan baik sehingga dapat mewujudkan Buku Bunga Rampai ini. Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas semua jerih payah yang telah diberikan oleh tim ini. Meskipun demikian, seperti kata pepatah: "Tiada gading yang tak retak" buku Bunga Rampai FISIP edisi ke-6 ini tentu tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, sehingga kritik dan saran dari para pembaca sangatlah kami harapkan.

Agustus, 2009

Dekan FISIP-UT

Tri Darmayanti  
NIP 131866177

## Daftar Isi

### Kata Pengantar

Nama Penulis Bunga Rampai

<i>Fluency Vs Accuracy</i> dalam Berbicara Bahasa Inggris (Siti Era Mardiani)	1
Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Suryarama)	17
<i>Market Segmentation</i> Dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Agus Santosa)	33
Pasar Tradisional Yang Semakin Tergusur (Parwitaningsih)	39
Viktimisasi, Sistem Peradilan Pidana, serta Restitusi dan/atau Hak Bagi Korban Kejahatan (Boedhi Oetojo)	59
Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Dalam Organisasi Pemerintah (Darmanto)	83
Ilmu Pemerintahan Relevansinya dengan Ilmu-ilmu lainnya (Prospektif Dalam Mengembangkan Jurusan di FISIP – UT) (Zainul Ittihad Amin)	95
Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS: Permasalahan dan Solusinya (Enceng)	103
Penataan Organisasi Pemerintah Daerah (Ayi Karyana)	119
Pengaruh Media Terhadap Politik dan Pengaruh Politik Terhadap Media (Kasus David Kelly dan BBC di Inggris) (Made Yudhi Setiani)	139
Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand) (F. Ratih Wulandari)	151

Feminisme dalam Demokrasi (Susanti)

161

Kajian Tentang Peningkatan Peran KORPRI dan Dharma Wanita Universitas Terbuka (Lilik Aslichati)

173

Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers (*Gender Hororgraphy*) (Ace Sriati Rachman)

187

Paradigma Baru Pola Asuh Anak: Membesarkan Anak dengan Kasih Sayang (Murni Rachmatini)

205

Menunggu Mutu Pelayanan Kelas Dunia PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia (Agus Priyanto)

217

Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pesan Singkat (SMS) dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh (Haryanto)

231

Paradigma *New Public Management* dan *New Public Service* dalam Manajemen Pelayanan Publik (F. Ratih Wulandari)

255

Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi pada Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Tangerang) (Liestyodono B. Irianto)

267

Persepsi Masyarakat tentang Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat (Darmanto)

287

Friksi dalam Tubuh Partai (Susanti)

297

## Nama Penulis Bunga Rampai

Nama	Judul Makalah	Penyunting	Kelompok
Siti Era Mardiani	<i>Fluency Vs Accuracy</i> dalam Berbicara Bahasa Inggris	Joko Rahardjo	Bahasa
Suryarama	Dilema Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia	Tiesnawati W	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Agus Santosa	<i>Market Segmentation</i> Dalam Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG	Tiesnawati W	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Parwitaningsih	Pasar Tradisional Yang Semakin Tergusur	Agus Santosa	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Boedhi Oetojo	Viktimisasi, Sistem Peradilan Pidana, serta Restitusi dan/atau Hak Bagi Korban Kejahatan	Mohamad Husni Arifin	HAM, Kriminologi & Sosiologi
Darmanto	Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Dalam Organisasi Pemerintah	Ida Royandiyah	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Zainul Ittihad Amin	Ilmu Pemerintahan Relevansinya dengan Ilmu-ilmu lainnya (Prospektif Dalam Mengembangkan Jurusan di FISIP – UT)	Djoko Rahardjo	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Enceng	Kebijakan Pengisian Jabatan Sekdes Dari PNS: Permasalahan dan Solusinya	Ari Yuliana	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Ayi Karyana	Penataan Organisasi Pemerintah Daerah	Enceng	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Made Yudhi Setiani	Pengaruh Media Terhadap Politik dan Pengaruh Politik Terhadap Media (Kasus David Kelly dan BBC di Inggris)	Ida Royandiyah	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik

Nama	Judul Makalah	Penyunting	Kelompok
F. Ratih Wulandari	Praktik Reformasi Administrasi di Beberapa Negara (Kasus China, Amerika Serikat, Indonesia, dan Thailand)	Meita Istianda	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik
Susanti	Feminisme dalam Demokrasi	Siti Aisyah	Masalah Gender
Lilik Aslichati	Kajian Tentang Peningkatan Peran KORPRI dan Dharma Wanita Universitas Terbuka	Meita Istianda	Masalah Gender
Ace Sriati Rachman	Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Pemberitaan Pers ( <i>Gender Hororgraphy</i> )	Mohamad Husni Arifin	Masalah Gender
Murni Rachmatini	Paradigma Baru Pola Asuh Anak: Membesarkan Anak dengan Kasih Sayang	Rosa Tosaini	Masalah Gender
Agus Priyanto	Menunggu Mutu Pelayanan Kelas Dunia PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia	Agus Santosa	Pelayanan Publik
Haryanto	Optimalisasi Pemanfaatan Layanan Pesan Singkat (SMS) dalam Sistem Pendidikan Jarak Jauh	Enceng	Pelayanan Publik
F. Ratih Wulandari	Paradigma <i>New Public Management</i> dan <i>New Public Service</i> dalam Manajemen Pelayanan Publik	Agus S.	Pelayanan Publik
Liestyodono B. Irianto	Pengaruh Kemampuan dan Perilaku Aparatur Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan (Studi pada Puskesmas-Puskesmas Kabupaten Tangerang)	Ari Yuliana	Pelayanan Publik
Darmanto, dkk	Persepsi Masyarakat tentang Layanan Puskesmas Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Rosa Tosaini	Pelayanan Publik
Susanti	Friksi dalam Tubuh Partai	Siti Aisyah	Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Politik

# Friksi dalam Tubuh Partai

Dra. Susanti, M.Si

Penyunting: Dra. Siti Aisyah, M.S

## A. PENDAHULUAN

Penerapan sistem demokrasi langsung dalam konteks negara modern dewasa ini tidak mungkin dilaksanakan. Pertambahan jumlah penduduk yang relatif besar, semakin luasnya wilayah negara, serta kompleksnya struktur sosial politik di masyarakat menyebabkan sistem demokrasi perwakilan lebih tepat untuk diterapkan. Dalam sistem perwakilan, nilai legitimasi menduduki arti yang sangat penting. Pelaksanaan nilai legitimasi ini perlu didukung oleh adanya lembaga politik, dan salah satu lembaga politik yang sangat penting dalam instrumen demokrasi adalah keberadaan partai politik.

Partai politik menurut Miriam Budiardjo (2000) didefinisikan sebagai kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama; serta bertujuan memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik -dengan cara konstitusional- untuk melaksanakan kebijaksanaan mereka. Dalam perkembangan partai politik, salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji adalah adanya friksi (perselisihan) dalam organisasi internal partai. Pertanyaan yang sering muncul adalah: Apakah benar setiap anggota dari partai politik yang sama mempunyai orientasi, nilai, dan cita-cita yang sama? Mungkin hal ini benar ketika anggota itu mulai bergabung dengan partai politik, namun dalam perkembangan lebih lanjut hal ini sering kali diragukan. Semakin berkembangnya jumlah partai politik di Indonesia tidak berarti bahwa friksi dalam tubuh partai akan hilang seiring dengan perkembangan waktu. Perkembangan kuantitas partai justru menunjukkan bahwa friksi dalam tubuh partai semakin berkembang. Pertanyaannya adalah: Mengapa friksi dalam tubuh partai terjadi, dan bagaimana partai mengantisipasi friksi ini? Makalah ini akan berusaha membahas kedua pertanyaan tersebut.



## B. KERANGKA TEORI

Berkaitan dengan basis kelompok dalam politik, Arthur F. Bentley dalam SP. Varma (1990) menekankan adanya hubungan antara orang-orang atau tindakan orang-orang dengan atau atas orang lain. Hal ini sebenarnya merupakan refleksi dari aktivitas sosial manusia. Berkaitan dengan aktivitas politik, Truman dalam Young (1984) mendefinisikannya sebagai aktivitas di mana berbagai kelompok membuat tuntutan mereka melalui atau atas lembaga-lembaga pemerintah (bukan pemerintah). Oleh karena itu, friksi sebagai suatu pengelompokan mewakili suatu patokan proses daripada bentuk yang statis dengan kriteria adanya interaksi di antara anggota-anggotanya secara individual yang terjadi relatif sering dan cukup terpolakan untuk menghasilkan aktivitas langsung. Bagi Bentley, oleh karena kelompok merupakan suatu aktivitas dari massa maka kepentinganlah yang mengarahkan aktivitas itu. Di sinilah konsep kepentingan Bentley masuk sebagai fokus utama memahami politik.

Lebih lanjut Bentley memberikan batasan kepentingan sebagai perilaku yang dihadapi, menyangkut suatu tuntutan atau tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh satu kelompok atas kelompok-kelompok tertentu dalam suatu sistem sosial. Kepentingan kelompok berkiblat pada kebijaksanaan (partai) dan kegiatan-kegiatan terhadapnya. Oleh karena itu, tidak diperlukan adanya standar eksternal di dalam mengukur kepentingan kelompok; dan semua kelompok harus mempunyai satu atau lebih kepentingan, dan menurut definisi tidak ada kelompok yang dapat bergerak bila bertentangan dengan kepentingan sendiri. Keseimbangan dapat tercapai bila didasari oleh latar belakang kebiasaan atau aturan permainan. Senada dengan itu kepentingan sebagaimana dikemukakan oleh Roy C. Macridis dan Brown (1996) merupakan kekuatan pendorong utama atau kekuatan penggerak yang mengarahkan setiap tindakan dan perilaku manusia atau kelompoknya.

Batasan Bentley ini relevan untuk memberikan batasan tentang kepentingan sebagai faktor penting yang mempengaruhi friksi dalam tubuh partai. Friksi ini cenderung mengarah pada dua kubu, dan kecenderungan seperti ini sangat dipengaruhi oleh teknik dan strategi pengaruh. Bentley menghubungkan ini dengan konsep tentang kekuatan

kelompok, kekuasaan, dan faktor-faktor kekuasaan, yaitu jumlah anggota kelompok, intensitas keterlibatan dengan kepentingan, dan bentuk organisasi yang dimanfaatkan kelompok.

Walaupun batas, ukuran, dan wilayah tiap friksi secara fisik dapat terlihat jelas, namun pendapat mereka tentang adanya bentuk integrasi, pola-pola kontrol dan keterbukaan anggotanya perlu dikaji lebih dalam untuk memahami proses internal yang terjadi dalam setiap friksi. Berkaitan dengan integrasi politik ini, Hoogerwerf (1985) menyatakan bahwa aspek penting dari integrasi horizontal adalah tingkat kepercayaan para anggota suatu sistem politik terhadap aktor-aktor politik lainnya dalam sistem ini; dan kepercayaan politik ini mungkin berkaitan dengan kepercayaan yang lebih umum terhadap sesama manusia.

## C. PEMBAHASAN MASALAH

Friksi dalam tubuh partai dapat menyentuh semua partai, tidak memandang partai itu besar ataupun kecil. Di Indonesia, frekuensi friksi semakin terlihat nyata di awal masa reformasi, bahkan sampai melembaga dalam fraksi di lembaga perwakilan. Gejala friksi dalam tubuh partai ini justru semakin kuat dan terlihat *kentara* dalam masyarakat ketika diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 membawa implikasi penting dalam kehidupan demokrasi, yaitu disahkannya pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Implikasi dari Pilkada ini adalah meminimalisasi benturan di tingkat massa, sehingga diharapkan terjadi kedewasaan politik di tingkat elit; mengingat pencalonan kepala daerah hanya dimungkinkan melalui partai politik sebagai lembaga politik di tingkat lokal (Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik). Kewenangan yang besar dalam tubuh partai politik ini sering kali disusupi oleh kepentingan-kepentingan kelompok, baik dari para calon kepala daerah atau kelompok dalam partai itu sendiri.

Sebagai contoh pada waktu pencalonan pilkada Gubernur Banten. Seorang calon dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mendapat rekomendasi dari partainya, namun calon ini dapat diusung dari



Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kasus ini menjadi perdebatan sengit di PDIP itu sendiri, bahkan kemudian muncul tiga friksi dalam tubuh PDIP. Yaitu: kubu yang mendukung pencalonan, kubu yang tidak mendukung pencalonan, dan kubu yang netral. Bukan berarti yang netral ini tidak punya pendapat, namun kubu ini membuka wacana wawasan publik bahwa pencalonan ini tidak harus melalui partai politik tetapi juga dibuka peluang pencalonan secara individu. Setiap kubu mempunyai kepentingan dan agenda politik tersendiri, yang jelas semuanya mengarah pada kekuasaan. Hal ini sebenarnya menggambarkan bahwa friksi dalam partai tidak harus terdikotomi menjadi dua kubu sebagaimana dikemukakan Bentley; namun faktor pengaruh, kepentingan dan dukungan publik sangat mempengaruhi kekuatan friksi dalam tubuh partai. Tidak semua kepentingan kelompok terpenuhi, lahirnya partai politik baru seperti, misalnya Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. disinyalir karena kekecewaan kelompok dengan kepemimpinan partai sebelumnya.

Friksi tidak selalu dilatarbelakangi konflik kelompok, tetapi dapat juga karena kepentingan individu yang tidak terpenuhi. Dengan demikian, pendapat Bentley yang mengemukakan bahwa pendekatan kelompok paling tepat untuk menganalisis konflik partai tidak selalu benar. Individu yang mempunyai kapasitas untuk menggerakkan dukungan, juga mempunyai andil untuk membentuk friksi dalam partai. Dalam hal ini memang tergantung kapasitas individu tersebut dan aktivitas politik yang dilakukannya.

Dalam kompetisi politik yang ketat, benturan kepentingan hanya sebatas instrumen. Peran pentingnya adalah bagaimana kepentingan ini digunakan untuk mencoba mendapatkan pengaruh, ditukar atau dikombinasikan dengan bentuk sumber daya yang lain guna meraih kekuasaan politik. Dalam konstelasi perpolitikan di Indonesia, tidak jarang seorang kader suatu partai politik berpindah menjadi kader partai politik lain demi merebut kepentingan. Oleh karena itu, friksi sebagai suatu kelompok (kubu) lebih mewakili suatu patokan proses daripada bentuk yang statis dengan kriteria adanya interaksi di antara anggota-anggotanya secara individual terjadi relatif sering dan cukup terpolakan untuk menghasilkan aktivitas langsung. Mengingat kelompok merupakan suatu

aktivitas dari massa maka kepentinganlah yang mengarahkan aktivitas itu. Di sinilah konsep kepentingan Bentley masuk sebagai fokus utama memahami politik. Latar belakang ini perlu dipahami untuk mendeskripsikan kepentingan pihak-pihak yang berfriksi. Jadi kepentingan friksi dapat dilihat dari aktivitas yang dilakukan tiap friksi.

Friksi dalam tubuh partai bila tidak segera diselesaikan maka akan menghabiskan energi partai itu sendiri. Elit partai politik dapat melakukan integrasi politik sebagai tahap awal konsolidasi partai. Benturan kepentingan antarfriksi memang tidak mudah untuk diselesaikan, bahkan sering kali meskipun sudah diselesaikan masih menorehkan goresan bagi pihak-pihak yang berfriksi. Dalam kasus pencalonan di atas, integrasi politik dalam partai membutuhkan campur tangan dari Ketua Umum PDIP, yaitu dengan *merecall* kader partainya yang diusung oleh partai lain dan memberikan surat pemecatan keanggotaan partai bagi calon. Hal ini sejalan dengan pendapat Hoogerwerf (1985) yang menyatakan bahwa aspek penting dari integrasi horizontal adalah tingkat kepercayaan para anggota suatu sistem politik terhadap aktor-aktor politik lainnya dalam sistem ini; dan kepercayaan politik ini mungkin berkaitan dengan kepercayaan yang lebih umum terhadap sesama manusia. Dalam hal penyelesaian kasus friksi dalam partai dibutuhkan elit yang berpengaruh dalam mengintegrasikan anggotanya. Dengan demikian, keseimbangan baru dapat tercapai bila didasari oleh latar belakang kebiasaan atau aturan permainan yang jelas.

Friksi dalam partai sekecil apapun akan tetap ada, yang menjadi perdebatan adalah bagaimana partai mengantisipasi friksi ini? Selama manusia masih mempunyai ambisi dan keinginan, termasuk keinginan berkuasa maka kecenderungan friksi dalam tubuh partai itu masih tetap ada. Friksi bila tidak dikelola dengan baik maka akan menurunkan loyalitas pemilih untuk berpindah ke partai lainnya, bahkan gejala volatilitas, yaitu pergeseran kesetiaan pemilih dari satu partai ke partai lainnya ini sangat dominan terjadi di Indonesia. Gejala volatilitas ini merupakan lahan penting bagi tumbuhnya friksi dalam partai. Hal ini secara tidak langsung berarti bahwa partai belum punya ideologi yang kokoh, sebab elit-elitnya juga sangat oportunis; sedangkan rakyat lebih memilih partai yang memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat. Yang perlu diantisipasi

adalah partai politik perlu melakukan proses rekrutmen politik yang mengakar pada konstituennya disertai dengan landasan ideologi partai yang kokoh, tidak diisi oleh elit oportunis.

Friksi dalam tubuh partai politik ini tidak selalu harus dilihat sebagai suatu hal yang negatif atau tabu karena menunjukkan bahwa friksi tidak saja merupakan sumber inefektivitas partai dalam menjalankan fungsinya sebagai artikulasi kepentingan konstituen. Apabila friksi tidak segera ditangani secara tuntas dalam konsensus partai, maka dapat diprediksi akan melahirkan disfungsi partai. Partai yang seharusnya dapat menjadi contoh dalam mengelola konflik masyarakat, tetapi justru melahirkan konflik yang tidak ditangani dengan baik sehingga dapat melemahkan otoritas dan legitimasi kepengurusan partai. Sebagai contoh, berkurangnya dukungan rakyat pada suatu partai politik tertentu dapat disebabkan karena tingginya frekuensi friksi yang terjadi dalam tubuh partai dan tidak tertangani secara baik.

Di sisi lain, friksi juga dapat dilihat dari sisi positif sebagai pembelajaran demokrasi. Adanya friksi akan membuka wawasan sebagai sarana artikulasi kepentingan yang berbeda dalam partai. Eksistensi friksi dapat menjadi alternatif kebijakan dan mekanisme kontrol horizontal. Secara tidak langsung akan menunjukkan proses demokrasi dalam tubuh partai politik. Bila friksi memerlukan campur tangan elit partai dalam proses penyelesaian konflik, maka hal ini menunjukkan bahwa partai yang seharusnya menjadi sarana pembelajaran demokrasi namun tidak dapat menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga demokrasi.

Keseimbangan friksi dalam partai politik ini dapat terjadi bila didasari aturan permainan dalam partai politik secara jelas. Selama ini AD/ART partai politik belum mengatur pada tataran cara penyelesaian konflik dalam partai bila tidak terjadi keseimbangan. Gejala bergesernya loyalitas pimpinan partai pada partai politik afiliasinya ini disinyalir karena kurang mengakarnya proses rekrutmen politik yang terjadi dalam tubuh partai politik. Seorang pimpinan partai politik seharusnya diisi oleh orang-orang yang benar-benar kader partai dari bawah dan mengakar ke bawah, sehingga yang bersangkutan mempunyai ideologi yang sejalan dengan ideologi partai. Ideologi partai politik yang kuat ini bila frekuensinya sama dengan ideologi

para pimpinan partai yang bersangkutan, diharapkan menjadi pegangan dasar yang kuat bagi partai politik dalam mengatasi friksi horizontal.

Friksi dalam tubuh partai politik merupakan bagian dari konflik internal partai politik. Faktor penyebab friksi ini dapat kelompok atau individu dalam partai itu sendiri, namun dapat pula disebabkan oleh faktor eksternal partai politik. Sebagaimana pengalaman Indonesia pada masa Orde Baru, ketika Kongres Partai Demokrasi Indonesia di Denpasar memutuskan bahwa Ketua PDI adalah Megawati Sukarno Putri. Pemerintah masa Orde Baru yang identik dengan Golongan Karya melihat kepemimpinan Megawati sebagai faktor yang akan mengalahkan perolehan Pemilu, maka berbagai rekayasa dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru. Caranya menganggap bahwa hasil keputusan Kongres PDI di Denpasar tidak sah, sehingga Kongres perlu diulang untuk memilih Ketua DPP PDI. Kongres tandingan yang diadakan di Jakarta ini kemudian memilih Suryadi sebagai Ketua DPP PDI. Hal ini tentu saja melahirkan friksi dalam tubuh PDI terutama dari DPD PDI yang ada di Propinsi dan DPC di Kabupaten/Kota yang tidak menyetujui pelaksanaan kongres tandingan yang didukung oleh pemerintah. Perlu diketahui bahwa dalam struktur organisasi PDI, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ada di ibukota negara, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) di tingkat propinsi, dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di tingkat kabupaten/kota, dan Pengurus Anak Cabang (PAC) di tingkat kecamatan. Friksi di tingkat pusat (DPP) ini membawa dampak yang hebat di tingkat bawah (DPD, DPC, dan PAC). Bila friksi ini tidak dikelola dan tidak diselesaikan dengan baik, maka masyarakat di tingkat bawah yang paling terkena dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa perebutan kepemimpinan partai juga dapat memicu timbulnya friksi dalam tubuh partai.

Apabila dikaji lebih mendalam, seberapa besar tingkat keberhasilan faktor eksternal partai politik sebagai faktor pemicu timbulnya friksi dalam tubuh partai politik dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor aktivitas politik yang dijalankan oleh setiap kelompok dan atau individu partai politik yang bersangkutan terhadap partai politik lain, pemerintah, atau masyarakat konstituennya. Semakin besar aktivitas politik yang dijalankan, maka kelompok atau individu yang bersangkutan mendapat masukan untuk program-program partai, yang berupa dukungan massa terhadap kebijakan

yang akan diusulkan kelompok/individu tersebut kepada partai politik. Patut diingat bahwa keterwakilan seseorang dalam partai politik sangat dipengaruhi oleh dukungan suara masyarakat, mengingat sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia adalah sistem proporsional terbuka. Faktor historis lahirnya partai politik yang bersangkutan juga menyumbang terhadap munculnya friksi internal partai politik.

Kajian historis sebagai latar belakang lahirnya partai politik (artinya ideologi yang mendasari) serta proses rekrutmen politik yang terjadi dapat digunakan untuk menelusuri friksi internal partai politik. Penelusuran terhadap sejarah partai menunjukkan bahwa PDI merupakan fusi dari beberapa partai yang ideologi awalnya tentu berbeda dengan partai hasil fusi. Friksi internal PDI ini bisa dilihat sebagai konsekuensi dari proses fusi yang mengaburkan basis legitimasi identitas dari masing-masing unsur yang berfusi dalam partai. Sebagai contoh Parkindo dan PNI sebagai salah satu partai yang berfusi di PDI corak pendukungnya sangat berbeda. Parkindo basis pendukungnya adalah masyarakat Indonesia Timur dengan basis keagamaan Katholik sedangkan PNI sebagian besar pendukungnya masyarakat Jawa dengan dasar ideologi nasionalis. Jelas sekali, dengan adanya fusi maka faktor pengikat antara partai dengan massa pendukungnya menjadi terputus. Akibatnya kepemimpinan partai sukar berorientasi ke bawah karena masyarakat bawah pun juga belum tentu mau menerima kepemimpinan partai yang berfusi; sebaliknya kepemimpinan yang terpilih menjadi lebih bergantung ke atas (pemerintah). Pemerintah selanjutnya ikut menentukan komposisi kepemimpinan partai khususnya dalam penyusunan Pengurus DPP.

#### D. KESIMPULAN

Friksi dalam tubuh partai dapat terjadi karena beberapa faktor, di antaranya: merebut pengaruh untuk menggolkkan kepentingan pihak-pihak yang berfriksi, perebutan kepemimpinan partai, faktor eksternal partai politik. Friksi bila tidak segera diselesaikan maka akan memberikan pengaruh negatif bagi partai, di antaranya menurunkan loyalitas pemilih untuk berpindah ke partai lainnya di samping menghabiskan energi dalam

partai itu sendiri untuk melakukan konsolidasi. Dalam konsolidasi pihak-pihak yang berfriksi, peran top elit partai sangat dominan. Friksi tidak selamanya bersifat negatif, tetapi dapat diubah menjadi alternatif kebijakan dan mekanisme kontrol horizontal. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor penyebab friksi dalam tubuh partai politik dapat berasal dalam tubuh partai politik itu sendiri (faktor internal partai) atau dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal, baik sifatnya kelompok atau individu. Seberapa jauh faktor internal partai dapat menyebabkan friksi sangat tergantung pada top elit partai dalam melakukan konsolidasi internal. Sedangkan seberapa jauh faktor eksternal partai politik itu dapat menyebabkan friksi, sangat tergantung dari aktivitas politik kelompok/individu partai yang bersangkutan dengan partai lain, masyarakat, atau pemerintah; resistensi kelompok/individu dalam partai politik mampu mengelola konflik, serta proses rekrutmen politik dalam partai yang mengakar ke bawah disertai dasar ideologi partai yang kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (2000). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Varma, SP. (1990). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali.
- Young, Oran R. (1984). *Sistem Ilmu Politik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Macridis, Roy C.; Brown, Bernard E. (1996). *Perbandingan Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Hoogerwerf, Prof. DR. (1985). *Politikologi*. Jakarta: Erlangga.